

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 8, No. 1, 2026

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK SENI NEGOSIASI DAN
MANAJEMEN PENCITRAAN DALAM ARENA POLITIK MODERN**

Ahmad Rasyid Ritonga¹, Katimin², Hasrat Efendi Samosir³

ahmad4004233022@uinsu.ac.id, katimin@uinsu.ac.id,
hasratefendisamosir@uinsu.ac.id

Abstract

In the context of modern politics, political communication has a very important role, where negotiation strategies and image management are the main components in building and maintaining power. This article examines a range of effective political communication strategies, with an emphasis on negotiation skills and image management in today's political environment. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to explore various communication strategies applied by political actors in various situations. The findings of this study show that success in the world of politics depends not only on the strength of the arguments presented, but also on the ability to negotiate adaptively and build a strong and consistent self-image. Negotiation skills in modern politics require a deep understanding of audience psychology, the use of persuasive rhetoric, as well as the ability to form effective strategic coalitions. This shows that negotiation is not just a bargaining process, but also an art that requires special skills. Image management requires consistency in political narratives, optimal use of social media, and smart crisis management strategies to maintain reputation in the eyes of the public. Therefore, an effective political communication strategy must include a balance between flexible negotiations and planned image management, so as to achieve the desired political goals more effectively. This holistic approach will provide a strong foundation for political actors to face the challenges that exist in the current political arena.

Keywords: Negotiation Strategy, image management, political communication

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

A. PENDAHULUAN

Demokrasi saat ini diakui oleh hampir semua negara sebagai sistem pemerintahan yang paling efektif, termasuk Indonesia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam penerapan demokrasi, meskipun mengalami berbagai variasi dan dinamika. Keberadaan partai politik (parpol) menjadi suatu keharusan sebagai representasi suara rakyat dalam proses bernegara. Dalam konteks Indonesia, dinamika perpolitikan yang berkaitan dengan kekuasaan merupakan fenomena yang menarik untuk dianalisis, baik dari segi sarana (*polity*), aksi (*politics*), maupun tujuan (*policy*). Parpol dan elit politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, gaya perpolitikan yang diterapkan oleh parpol memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju.⁴

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, perkembangan demokrasi di negara ini terus berlangsung. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai partai politik yang beragam. Keberadaan sistem politik multi partai ini secara signifikan mengubah lanskap perpolitikan di Indonesia dengan hadirnya partai-partai baru. Secara nyata, kehadiran partai-partai baru ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Situasi ini juga menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia telah menjadikan partai politik sebagai pilar utama dalam mendukung demokrasi.

Pertumbuhan partai politik di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, karena hal ini membawa harapan baru bagi peningkatan aspirasi politik masyarakat. Kehadiran partai-partai baru menuntut upaya yang signifikan agar dapat diterima oleh publik. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai partai politik masih sangat terikat pada partai-partai yang ada sejak era Orde Baru. Realitas politik ini mendorong partai politik untuk lebih mendekatkan diri kepada

⁴ ROGER FISHER, 'Negotiating Power', *American Behavioral Scientist*, 27.2 (1983), 149-66 <<https://doi.org/10.1177/000276483027002004>>.

konstituen di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan dalam upaya partai politik untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengingat tingginya tingkat persaingan antar partai politik.⁵

Komunikasi politik memainkan peran krusial dalam pengelolaan citra serta strategi komunikasi yang diterapkan oleh para aktor politik. Secara umum, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan atau ide antara aktor politik dan masyarakat, yang melibatkan media serta berbagai teknik komunikasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik. Dalam konteks negosiasi dan pencitraan, komunikasi politik berfungsi sebagai alat strategis untuk membangun kesan, mendapatkan dukungan, dan mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Komunikasi politik adalah komponen esensial dalam proses negosiasi dan pembentukan citra di bidang politik. Definisi komunikasi politik mencakup proses penyampaian informasi, ide, dan pesan-pesan politik oleh berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas politik, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Peran komunikasi politik sangat signifikan dalam memengaruhi opini publik, membangun reputasi, serta mencapai tujuan-tujuan politik yang diinginkan.

Dalam konteks negosiasi politik, komunikasi berfungsi sebagai elemen yang sangat penting. Proses ini mencakup tawar-menawar, pencarian kompromi, dan upaya untuk menemukan solusi di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Komunikasi yang efektif memungkinkan para pihak untuk memahami perspektif satu sama lain, mengidentifikasi kemungkinan kompromi, dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berempati, serta penguasaan teknik-teknik negosiasi menjadi sangat krusial dalam situasi ini.⁶

⁵ Erving Goffman, 'Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience', *American Journal of Psychiatry* (New York: Harper & Row, 1975), 1093-a-1094 <<https://doi.org/10.1176/ajp.132.10.1093-a>>.

⁶ Roger Fisher, William Ury, and Bruce Patton, 'Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving In' (Houghton Mifflin, 1991).

Dalam ranah politik negosiasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok yang terlibat dalam politik melakukan dialog atau perundingan untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Proses ini melibatkan penggunaan taktik komunikasi yang persuasif serta argumentasi yang bertujuan untuk meyakinkan pihak lain. Negosiasi politik tidak hanya berorientasi pada keuntungan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak lain agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan negosiasi, strategi komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas negosiasi, di mana aktor politik dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih diterima oleh audiens, sambil tetap mempertahankan kepentingan politik mereka. Negosiasi yang berhasil menuntut aktor politik untuk menguasai keterampilan komunikasi interpersonal, bahasa tubuh, serta kemampuan untuk membaca situasi politik dengan baik.

Pencitraan politik adalah suatu usaha untuk menciptakan citra yang positif dan meningkatkan kredibilitas seorang politisi atau partai politik di hadapan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik memiliki peranan yang sangat signifikan, baik melalui media massa, platform media sosial, maupun interaksi langsung dengan para pemilih. Pilihan gaya komunikasi, penggunaan bahasa, pengelolaan informasi, serta penampilan dan sikap seorang politisi dapat berdampak pada cara pandang publik dan membantu membentuk citra yang diharapkan.⁷

Pencitraan politik merujuk pada usaha untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap individu atau institusi politik agar sejalan dengan citra ideal yang diharapkan. Proses ini melibatkan berbagai teknik komunikasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan reputasi, serta memperkuat legitimasi politik. Pencitraan memiliki peranan yang krusial karena

⁷ Margaret Scammell, *Designer Politics: How Elections Are Won*, *Choice Reviews Online*, 1995, XXXIII <<https://doi.org/10.5860/choice.33-1168>>.

dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebijakan, tindakan, dan karakter seorang tokoh atau lembaga. Para aktor politik sering memanfaatkan media massa dan media sosial untuk memperkuat citra mereka di hadapan publik. Kampanye pencitraan ini umumnya menggunakan simbol-simbol tertentu, slogan yang menarik, serta penyampaian pesan yang terencana untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McNair, pencitraan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesan positif, tetapi juga untuk meredakan opini negatif yang beredar di kalangan masyarakat.⁸

Model pembentukan citra yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan bagaimana stimulus eksternal diorganisasikan dan memengaruhi respons individu. Stimulus yang diterima oleh individu dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus ditolak, proses selanjutnya tidak dapat dilanjutkan, yang menunjukkan bahwa stimulus tersebut tidak efektif dalam memengaruhi individu karena kurangnya perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika stimulus diterima, hal ini menandakan adanya komunikasi dan perhatian dari organisme, sehingga proses berikutnya dapat berlangsung. Ilustrasi yang disajikan juga menunjukkan bahwa komunikasi tidak secara langsung menghasilkan pendapat atau perilaku tertentu, melainkan lebih cenderung memengaruhi cara individu mengorganisasikan citra mereka tentang lingkungan, yang pada gilirannya memengaruhi pendapat dan perilaku mereka. Secara konkret, citra politik muncul sebagai hasil dari kognisi politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencitraan adalah proses yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap pesan yang memengaruhi dan merangsangnya. Citra yang terbentuk dalam pikiran seseorang mungkin berbeda dari realitas objektif, atau imajinasi yang dimiliki mungkin tidak sejalan dengan realitas empiris.⁹

Media baik yang bersifat tradisional maupun digital, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendukung komunikasi politik, terutama dalam

⁸ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, 2018.

⁹ Anang Anas Azhar, *KOMUNIKASI POLITIK UNTUK PENCITRAAN Konsep, Strategi Dan Pencitraan Politik* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

aspek negosiasi dan pencitraan. Media berfungsi sebagai alat yang efisien untuk menyampaikan pesan serta memengaruhi pandangan publik. Di era digital saat ini, media sosial muncul sebagai platform yang sangat berpengaruh, berkat jangkauan yang luas, kecepatan dalam penyebaran informasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan melalui media massa dapat memberikan bantuan kepada aktor politik dalam menyebarkan informasi yang mereka inginkan kepada publik yang lebih luas, memperkuat pengaruh mereka, serta menjangkau berbagai segmen masyarakat. Dalam konteks negosiasi, media sering kali digunakan sebagai sarana untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara membangun dukungan publik yang dapat memperkuat posisi dalam proses negosiasi.¹⁰

Menurut teori framing yang dikemukakan oleh Goffman, cara penyampaian pesan dapat memengaruhi pemahaman penerima terhadap situasi atau isu tertentu. Hal ini sangat penting dalam konteks pencitraan politik, di mana para aktor politik membentuk citra diri mereka sesuai dengan harapan audiens. Di sisi lain, teori agenda-setting yang diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw menegaskan bahwa media memiliki peran signifikan dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat, yang sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk membangun citra dan memengaruhi proses negosiasi.¹¹ Komunikasi politik memainkan peranan yang krusial dalam proses negosiasi dan pencitraan, terutama di dalam konteks politik yang kompetitif dan terpengaruh oleh media. Salah satu isu utama yang timbul adalah bagaimana komunikasi politik dapat secara efisien membentuk persepsi masyarakat dan memengaruhi hasil negosiasi, baik dalam hubungan antar-politisi maupun antara politisi dan masyarakat luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

¹⁰ Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw, 'The Agenda-Setting Function of Mass Media 2', *The Agenda Setting Journal*, 1.2 (2017), 105–16 <<https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>>.

¹¹ Goffman.

mendalam mengenai strategi komunikasi politik, teknik negosiasi, serta pengelolaan citra yang diterapkan oleh para aktor politik dalam konteks politik kontemporer.¹² Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena komunikasi politik, serta strategi yang digunakan dalam proses negosiasi dan pengelolaan citra politik.¹³ Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap praktik komunikasi dan strategi yang diimplementasikan oleh aktor politik, yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika politik saat ini.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Komunikasi Politik dalam Proses Negosiasi

Komunikasi politik merujuk pada proses penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat melalui berbagai saluran media atau interaksi langsung, dengan tujuan membentuk persepsi dan memengaruhi sikap publik. Dalam konteks negosiasi dan pencitraan, komunikasi politik memiliki peranan krusial dalam menciptakan citra positif serta membangun hubungan yang saling menguntungkan. Pencitraan politik dan negosiasi dapat dipahami sebagai strategi komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi pandangan dan posisi publik terhadap individu politisi, organisasi, atau kebijakan tertentu.

Komunikasi politik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses negosiasi politik, karena hal ini berpengaruh pada efektivitas interaksi, pengaruh yang dihasilkan, serta pencapaian kesepakatan yang diharapkan. Dalam konteks negosiasi, fungsi komunikasi politik menjadi krusial untuk membangun pemahaman yang sama, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memengaruhi pihak lain melalui teknik persuasi dan argumentasi yang tepat. Salah satu peran

¹² John W. Creswell, *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009) <<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>.

¹³ Johnny Saldana Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), XI.

¹⁴ Harry T. Reis and Charles M. Judd, *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY, Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII.

penting komunikasi politik dalam konteks negosiasi adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang tepat dan jelas. Informasi yang disampaikan mencakup tujuan dari negosiasi, batasan yang ada, serta harapan dari semua pihak yang terlibat. Melalui komunikasi yang efektif, kedua belah pihak dapat memahami posisi masing-masing dan batasan yang mereka hadapi, sehingga proses negosiasi dapat berlangsung dengan lebih efisien.¹⁵

Negosiasi politik memerlukan komunikasi yang efisien untuk menciptakan pemahaman dan kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks komunikasi politik untuk negosiasi, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Seorang negosiator politik perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan argumen secara meyakinkan dan persuasif guna memperoleh dukungan atau konsensus dari pihak lain.
- b. Fleksibilitas dalam komunikasi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau perubahan yang terjadi sangat penting agar proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik.
- c. Memahami perspektif pihak lain serta menunjukkan empati dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan membuka peluang untuk mencapai kesepakatan.

Komunikasi politik dalam konteks negosiasi berperan penting dalam fungsi persuasi, yang bertujuan untuk meyakinkan pihak lain agar menerima sudut pandang atau posisi tertentu. Persuasi merupakan salah satu strategi krusial dalam negosiasi politik, karena dapat memengaruhi keputusan serta arah dari kesepakatan yang dicapai. Melalui argumentasi yang solid dan logis, yang didukung oleh data yang relevan, seorang negosiator dapat mendorong pihak lain untuk lebih menerima posisi yang diusulkan.¹⁶

Kepercayaan adalah elemen krusial dalam setiap proses negosiasi. Dalam konteks ini, komunikasi politik berperan sebagai sarana untuk membangun dan

¹⁵ Fisher, Ury, and Patton.

¹⁶ Richard M. Perloff, *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes*, 2017.

mempertahankan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Elemen-elemen seperti transparansi, konsistensi, dan kejujuran dalam penyampaian informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan. Keberadaan kepercayaan yang solid dapat memperlancar proses negosiasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik.¹⁷

Negosiasi dalam konteks politik tidak hanya berfokus pada pencarian kesepakatan, tetapi juga bertujuan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan. Melalui komunikasi politik, para negosiator dapat mengembangkan hubungan yang positif, yang akan memberikan keuntungan dalam proses negosiasi atau kolaborasi di masa depan. Dengan menerapkan pendekatan komunikasi yang bersifat kooperatif dan berfokus pada penyelesaian konflik, para negosiator mampu menciptakan fondasi hubungan yang saling menguntungkan.¹⁸

Negosiasi dalam komunikasi politik melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan kata, media komunikasi yang digunakan, serta pengendalian pesan yang disampaikan. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak atau, dalam konteks politik, mendekati tujuan yang diinginkan dengan membangun dukungan dan kesepahaman.¹⁹ Komunikasi politik memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengendalikan konflik dalam proses negosiasi. Saat negosiasi mengalami kebuntuan atau terdapat perbedaan yang signifikan, komunikasi yang efektif dapat membantu para negosiator untuk mencari solusi dengan meredakan ketegangan yang ada. Sebagai contoh, para negosiator dapat menerapkan komunikasi yang bersifat diplomatis, mengendalikan emosi, serta mempertahankan sikap profesional dalam interaksi mereka untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik.²⁰

¹⁷ Niklas Luhmann, 'Turst and Power', 1979, pp. 1–207.

¹⁸ FISHER.

¹⁹ Leigh L. Thompson, *Negotiation Theory and Research* (New York: Psychology Press, 2006).

²⁰ Thomas A. Kochan and Morton Deutsch, 'The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes.', *Administrative Science Quarterly*, 19.2 (1974), 268 <<https://doi.org/10.2307/2393904>>.

Dalam konteks negosiasi, komunikasi politik berperan penting dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses negosiasi yang berhasil memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdialog, mengungkapkan harapan, dan mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi yang bersifat partisipatif, di mana setiap pihak merasa dihargai dan didengarkan, mendukung terciptanya keputusan yang lebih inklusif dan adil.²¹ Komunikasi politik dalam konteks negosiasi memiliki sejumlah fungsi krusial, antara lain menyampaikan informasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan memfasilitasi pengambilan keputusan secara kolektif. Fungsi-fungsi ini menjamin bahwa negosiasi politik tidak hanya terfokus pada pencapaian kesepakatan, tetapi juga pada pengembangan hubungan yang berkelanjutan serta pengelolaan potensi konflik yang mungkin timbul. Dengan komunikasi yang efektif, para pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

2. Fungsi Komunikasi Politik dalam Membangun Citra

Komunikasi politik memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan citra seorang pemimpin, partai, atau kebijakan di hadapan publik. Citra politik yang solid dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan membentuk dukungan, yang sangat vital dalam meraih kemenangan dalam pemilu atau menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Dalam hal ini, komunikasi politik berfungsi sebagai penghubung antara aktor politik dan audiens untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan pencitraan yang diinginkan.

Pencitraan merupakan suatu strategi dalam komunikasi politik yang bertujuan untuk membentuk pandangan positif masyarakat terhadap individu, organisasi, atau kebijakan tertentu. Dalam rangka mencapai pencitraan yang efektif, terdapat beberapa aspek komunikasi yang perlu diperhatikan, antara lain:

²¹ David Saunders and Bruce Barry Roy Lewicki, *Negotiation* (New York: McGraw-Hill Education, 2015).

- a. Untuk menciptakan citra yang kuat, diperlukan penyampaian pesan yang seragam di berbagai media dan platform.
- b. Masyarakat cenderung lebih mempercayai politisi yang dianggap tulus dan sejalan dengan tindakan serta pesan yang mereka sampaikan.
- c. Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam pencitraan politik. Melalui platform ini, politisi dapat berkomunikasi secara langsung dan interaktif dengan publik. Pencitraan yang efektif tidak hanya berkontribusi pada persepsi positif, tetapi juga dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan atau program tertentu. Citra yang kuat sering kali menjadi faktor penentu dalam kesuksesan karier politik seorang tokoh atau keberlangsungan suatu kebijakan.²²

Citra yang positif dapat memberikan dampak yang menguntungkan, seperti peningkatan dukungan politik, keterikatan emosional dengan masyarakat, serta peningkatan kredibilitas. Sebaliknya, citra yang negatif dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi komunikasi politik untuk dikelola dengan hati-hati agar citra yang terbentuk sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan politik. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat kini memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menilai keaslian dan konsistensi dari pesan-pesan politik. Dengan demikian, citra yang autentik dan komunikatif lebih cenderung efektif dibandingkan dengan citra yang bersifat manipulatif.²³

Komunikasi politik berfungsi sebagai sarana bagi aktor untuk mengungkapkan identitas mereka, representasi yang mereka bawa, serta nilai-nilai yang dijunjung. Identitas ini sangat krusial dalam membedakan seorang politisi atau organisasi dari pesaingnya. Dengan demikian, komunikasi politik berperan

²² James E. Combs Dan D. Nimmo, *Mediated Political Realities* (Universitas Michigan: Longman, 1990) <<https://doi.org/10.4135/9781412953993.n393>>.

²³ Stuart N Soroka, *Negativity in Democratic Politics: Causes and Consequences*, *Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) <<https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781107477971>>.

dalam membantu masyarakat memahami karakter, tujuan, dan sifat yang ingin ditampilkan oleh tokoh politik tersebut. Melalui penyampaian pesan yang terencana, komunikasi politik dapat diarahkan untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap seorang pemimpin atau kebijakan tertentu. Sebagai contoh, komunikasi yang berkelanjutan melalui kampanye media atau platform media sosial dapat berkontribusi dalam mengubah persepsi masyarakat dari yang negatif menjadi positif, atau sebaliknya. Dengan mengendalikan pesan dan mengelola media, komunikasi politik dapat berfungsi untuk menciptakan kesan positif terhadap diri sendiri dan kesan negatif terhadap lawan. Hal ini dilakukan melalui strategi komunikasi yang menyoroti keberhasilan, integritas, atau kompetensi seorang tokoh politik, sambil meminimalkan perhatian pada aspek-aspek yang dianggap merugikan.²⁴

Komunikasi yang dilakukan secara transparan dan konsisten dapat berkontribusi dalam membangun kepercayaan serta kredibilitas. Dalam konteks politik, masyarakat cenderung lebih mempercayai pemimpin yang bersikap terbuka dan konsisten dalam menyampaikan pesan, karena hal ini mencerminkan komitmen dan kejujuran. Kepercayaan publik yang terbangun melalui komunikasi yang efektif sering kali menjadi aset yang sangat berharga bagi tokoh politik dalam menghadapi berbagai tantangan politik. Komunikasi politik memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan citra. Dengan menerapkan strategi yang tepat, komunikasi politik dapat mendukung individu atau organisasi politik dalam menciptakan persepsi positif di kalangan masyarakat, memengaruhi pandangan publik, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dalam konteks era informasi yang transparan, pencitraan politik harus mempertimbangkan keseimbangan antara keaslian, konsistensi, dan pemanfaatan media secara strategis.

3. Dampak Komunikasi Politik terhadap Proses Negosiasi dan Strategi Pencitraan

²⁴ Kaspar D. Naeyele and Erving Goffman, 'The Presentation of Self in Everyday Life.', *American Sociological Review*, 21.5 (1956), 631 <<https://doi.org/10.2307/2089106>>.

Komunikasi politik memiliki posisi yang sangat penting dalam proses negosiasi dan pencitraan, terutama dalam konteks era digital yang terus berubah. Dalam konteks negosiasi, komunikasi politik berfungsi untuk membantu politisi dan organisasi dalam membangun hubungan yang solid, mencapai kesepakatan, serta mengelola konflik dengan cara yang efisien. Di sisi lain, dalam hal pencitraan, komunikasi politik berperan sebagai instrumen utama dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap tokoh politik, partai, atau kebijakan tertentu. Efektivitas komunikasi politik dapat berkontribusi pada peningkatan kredibilitas, kepercayaan, dan dukungan dari publik.

Komunikasi politik yang efektif memiliki peran penting dalam keberhasilan proses negosiasi politik, terutama dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pengaruh positif komunikasi politik dalam konteks negosiasi sangat signifikan. Negosiasi yang berhasil memerlukan adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi politik yang bersifat terbuka dan transparan berkontribusi dalam membangun kepercayaan tersebut, yang merupakan elemen krusial untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses negosiasi, komunikasi politik memungkinkan setiap pihak untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh lawan bicara. Hal ini mempermudah pencarian titik temu antara kedua belah pihak. Pemimpin atau negosiator yang mampu berkomunikasi dengan baik dan konsisten biasanya dianggap lebih kredibel, sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan ketidakpercayaan, ketegangan, atau bahkan kebuntuan dalam negosiasi, yang pada akhirnya dapat menghambat proses dan mengurangi dukungan dari audiens atau masyarakat.²⁵

Komunikasi politik yang efektif memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun dan menjaga citra politik yang positif. Konsistensi dalam

²⁵ Linda L. Putnam And Michael E. Roloff, *Communication and Negotiation* (Amerika Serikat: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2015).

komunikasi berkontribusi pada penguatan identitas politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi yang terencana, para politisi dapat menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan empati, yang sesuai dengan harapan publik. Komunikasi politik memberikan kesempatan bagi individu atau organisasi politik untuk secara proaktif mengelola persepsi masyarakat. Strategi yang diterapkan mencakup pengendalian pesan, pemanfaatan simbol, serta penekanan pada pencapaian positif untuk memperkuat citra yang baik di mata publik. Dalam konteks krisis, komunikasi politik sangat penting dalam mengatasi kerusakan citra. Penerapan strategi komunikasi yang tepat saat menghadapi krisis, seperti menunjukkan rasa empati atau mengambil tanggung jawab, dapat mempercepat pemulihan citra. Di era digital saat ini, media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam strategi pencitraan. Platform ini memungkinkan politisi untuk menyampaikan pesan secara langsung, menunjukkan sisi kemanusiaan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak tepat atau komunikasi yang tidak konsisten dapat berpotensi merusak citra dan berdampak negatif pada kepercayaan publik.²⁶

Dalam konteks negosiasi dan pencitraan, politisi perlu menyesuaikan cara berkomunikasi mereka dengan karakteristik audiens yang dituju. Pesan yang disampaikan harus memiliki relevansi, mudah dipahami, serta selaras dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh audiens tersebut. Media sosial berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk membangun citra. Melalui penyampaian konten yang konsisten dan interaksi langsung dengan masyarakat, media sosial dapat memperkuat ikatan emosional dengan publik, menciptakan kesan yang autentik, serta mendukung strategi pencitraan politik yang lebih luas. Konsistensi dalam komunikasi politik merupakan elemen yang sangat penting, baik dalam proses negosiasi maupun pencitraan. Penyampaian pesan yang seragam di berbagai platform media menunjukkan bahwa politisi berkomitmen terhadap nilai-

²⁶ Dan D. Nimmo.

nilai atau kebijakan yang mereka dukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Pendekatan komunikasi politik yang proaktif dalam menghadapi isu atau krisis juga dapat berkontribusi pada penguatan citra. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan responsif, citra seorang politisi atau organisasi dapat diperkuat, bahkan dalam situasi yang menantang.²⁷

- a. Keberhasilan komunikasi politik dalam konteks negosiasi dan pencitraan berpotensi meningkatkan kredibilitas tokoh politik serta membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Aspek ini sangat krusial agar kebijakan yang diajukan dapat memperoleh dukungan yang diperlukan.
- b. Citra yang kuat mampu memperkuat dukungan masyarakat, meskipun kebijakan yang diusulkan bersifat kontroversial atau menghadapi penolakan.
- c. Media memiliki peranan yang signifikan dalam menyebarkan citra politik yang ingin dibentuk. Liputan yang bersifat positif maupun negatif dari media dapat mempengaruhi keberhasilan pencitraan politik tersebut.²⁸

Dampak dari komunikasi politik terhadap proses negosiasi dan pencitraan memiliki peranan yang sangat penting. Melalui komunikasi politik yang efektif, kepercayaan dapat dibangun, identitas dapat diperkuat, dan persepsi publik terhadap individu atau kebijakan politik dapat dikelola dengan baik. Dalam konteks negosiasi, komunikasi yang efektif berkontribusi pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan serta meningkatkan kredibilitas para pihak yang terlibat. Di sisi lain, dalam hal pencitraan, penerapan strategi komunikasi yang tepat berfungsi untuk membentuk persepsi yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

D. KESIMPULAN

²⁷ Soroka.

²⁸ Doris Graber, 'The Power of Communication: Managing Information in Public Organizations' (Washington DC: CQ Press, 2003).

Komunikasi politik dalam konteks negosiasi dan pencitraan memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi publik, membangun kredibilitas, dan menggalang dukungan. Melalui strategi komunikasi yang tepat, politisi dan organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan kesepakatan politik yang saling menguntungkan, dan memperkuat pencitraan yang sesuai dengan tujuan strategis mereka. Peran komunikasi politik sangat krusial dalam membangun citra serta mencapai keberhasilan dalam proses negosiasi. Dalam konteks ini, komunikasi politik yang efektif berkontribusi pada pembentukan kepercayaan dan peningkatan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dalam hal pencitraan, komunikasi politik berfungsi sebagai instrumen utama untuk menciptakan persepsi positif yang dapat meningkatkan dukungan publik serta kepercayaan terhadap individu atau kebijakan politik tertentu. Komunikasi politik yang efektif ditandai oleh konsistensi, keaslian, dan relevansi terhadap audiens yang dituju. Dengan kemajuan teknologi digital, khususnya media sosial, komunikasi politik kini memiliki jangkauan yang lebih luas, memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan masyarakat. Pengelolaan yang baik terhadap platform ini dapat memperkuat citra politik dan menjaga kepercayaan publik, sedangkan ketidakefektifan atau ketidakkonsistenan dalam komunikasi dapat berakibat negatif, menghambat proses pencitraan, serta mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung. Penyampaian pesan yang konsisten di berbagai platform media akan menghasilkan citra yang kredibel dan dapat dipercaya.

Setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik, baik melalui media sosial maupun dalam konteks pidato resmi, harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau organisasi tersebut. Media sosial berfungsi sebagai sarana penting untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Namun, sangat penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap konten yang dipublikasikan. Interaksi yang responsif

dan autentik di media sosial dapat memperkuat hubungan emosional dengan audiens.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Anang Anas, *KOMUNIKASI POLITIK UNTUK PENCITRAAN Konsep, Strategi Dan Pencitraan Politik* (Medan: Perdana Publishing, 2017)
- Brian McNair, *An Introduction to Political Communication*, 2018
- Creswell, John W., *Research Design* (Los Angeles: Sage, 2009)
<<https://doi.org/10.4324/9781003411505-2>>
- Dan D. Nimmo, James E. Combs, *Mediated Political Realities* (Universitas Michigan: Longman, 1990) <<https://doi.org/10.4135/9781412953993.n393>>
- FISHER, ROGER, 'Negotiating Power', *American Behavioral Scientist*, 27.2 (1983), 149–66 <<https://doi.org/10.1177/000276483027002004>>
- Fisher, Roger, William Ury, and Bruce Patton, 'Getting to Yes Negotiating Agreement Without Giving In' (Houghton Mifflin, 1991)
- Goffman, Erving, 'Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience', *American Journal of Psychiatry* (New York: Harper & Row, 1975), 1093-a-1094 <<https://doi.org/10.1176/ajp.132.10.1093-a>>
- Graber, Doris, 'The Power of Communication: Managing Information in Public Organizations' (Washington DC: CQ Press, 2003)
- Judd, Harry T. Reis and Charles M., *HANDBOOK OF RESEARCH METHODS IN SOCIAL AND PERSONALITY PSYCHOLOGY*, *Journal GEEJ* (London and New York: Cambridge University Press, 2014), VII
- Kochan, Thomas A., and Morton Deutsch, 'The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes.', *Administrative Science Quarterly*, 19.2 (1974), 268 <<https://doi.org/10.2307/2393904>>
- Leigh L. Thompson, *Negotiation Theory and Research* (New York: Psychology Press, 2006)
- Linda L. Putnam And Michael E. Roloff, *Communication and Negotiation* (Amerika Serikat: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2015)
- Luhmann, Niklas, 'Turst and Power', 1979, pp. 1–207

- Matthew B. Milees, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, Sustainability (Switzerland)* (London and New York: Sage Publications, 2014), XI
- McCombs, Maxwell E., and Donald L. Shaw, 'The Agenda-Setting Function of Mass Media^{1 2}', *The Agenda Setting Journal*, 1.2 (2017), 105–16
<<https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>>
- Naegele, Kaspar D., and Erving Goffman, 'The Presentation of Self in Everyday Life.', *American Sociological Review*, 21.5 (1956), 631
<<https://doi.org/10.2307/2089106>>
- Richard M. Perloff, *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes*, 2017
- Roy Lewicki, David Saunders and Bruce Barry, *Negotiation* (New York: McGraw-Hill Education, 2015)
- Scammell, Margaret, *Designer Politics: How Elections Are Won*, *Choice Reviews Online*, 1995, XXXIII <<https://doi.org/10.5860/choice.33-1168>>
- Soroka, Stuart N, *Negativity in Democratic Politics: Causes and Consequences*, *Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) <<https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781107477971>>